

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANTUL**



**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2025**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf f Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Oleh karena itu BPKPAD selalu dituntut untuk memperbaiki layanan informasi dan mengembangkan layanan informasi, sehingga masyarakat Kabupaten Bantul dapat melihat secara langsung perkembangan Kabupaten Bantul.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul memiliki Ruang *Desk* Layanan Informasi Publik yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer dan ruang tunggu.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut:

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 – 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	09.00 – 15.00	11.00 – 13.00

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya. Telah disusunnya Tim Layanan Informasi Publik BPKPAD yaitu:

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
3	Pengelola Informasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator
4	Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan 1. Haqiqi Hardandy, S.Si 2. Muhammad Nurdias, A.Md	Koordinator Anggota Anggota
5	Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bidang Aset 1. Ratri Fitri Ariani, A.Md. 2. Murlina Sari Puspitaningrum, S.H. 3. Esti Darajati, A.Md 4. Raih Etika, A.Md 5. Muhammad Roisa Fahmi Fahlefi, A.Md	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
6	Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan 1. Deni Ari Dwi Hardani, S.T. 2. Fitri Susanti, S.E	Koordinator Anggota Anggota
7.	Pengelola Website	Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan 1. Widi Putro Prasetyo Aji, S.Kom. 2. Isnaini Nur Khasanah, A.Md 3. Krisdhian Praja Murti, A.Md	Koordinator Anggota Anggota Anggota

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.
 Belanja Informasi Publik dengan anggaran Rp 490.000.000,-
 Belanja makan minum rapat dengan anggaran Rp. 1.700.000,-

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	498 Pemohon
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-7 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	498 Pemohon
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2025 adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat akan pengertian dan peran PPID BPKPAD dalam memberikan pelayanan informasi sebagai upaya mendukung keterbukaan informasi publik.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2025, antara lain:

- Data dan informasi yang kurang *realtime*
- Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik seperti teknologi informasi

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perlunya membangun system pengumpulan data melalui media teknologi informasi, seperti Whatsapp Grup, Google drive, serta Google Form;
2. Pembuatan akun media sosial guna menampung berita atau pengumuman secara realtime;
3. Adanya kolaborasi dengan akun media sosial milik Pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga informasi pelayanan di BPKPAD dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Bantul; dan
4. Meningkatkan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pembantu, dengan cara memberikan tanggapan atau jawaban langsung kepada pemohon layanan informasi.

Lampiran I.

**KEGIATAN PPID PELAKSANA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan narasumber dari Komisi Informasi Daerah (KID) DIY	Januari
3	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari
4	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari
5	Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2025 secara daring/virtual dan luring	Mei
6	Pendampingan pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 bagi PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul	Mei
7	Verifikasi Faktual Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2025	Juli
8	Evakuasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 dan Penyerahan Piagam Penghargaan bagi Badan Publik yang Informatif	Agustus
9	Pertemuan Pengelola Media Sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	Juni
10	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember

Bantul, 5 Februari 2026

PPID Pelaksana



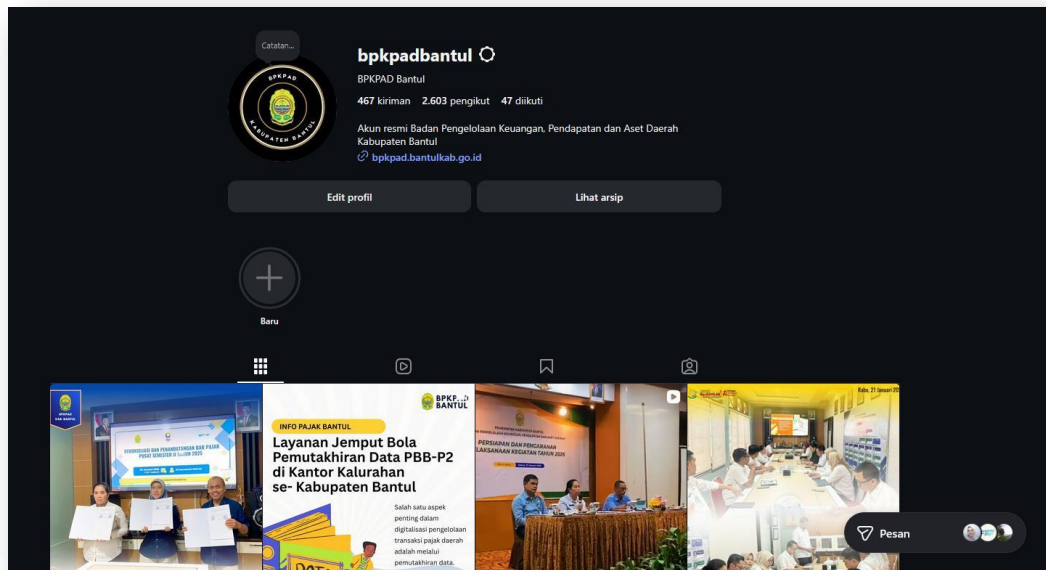
Istirul Widilastuti, S.IP., MPA

Pembina Tk. I/IV/b

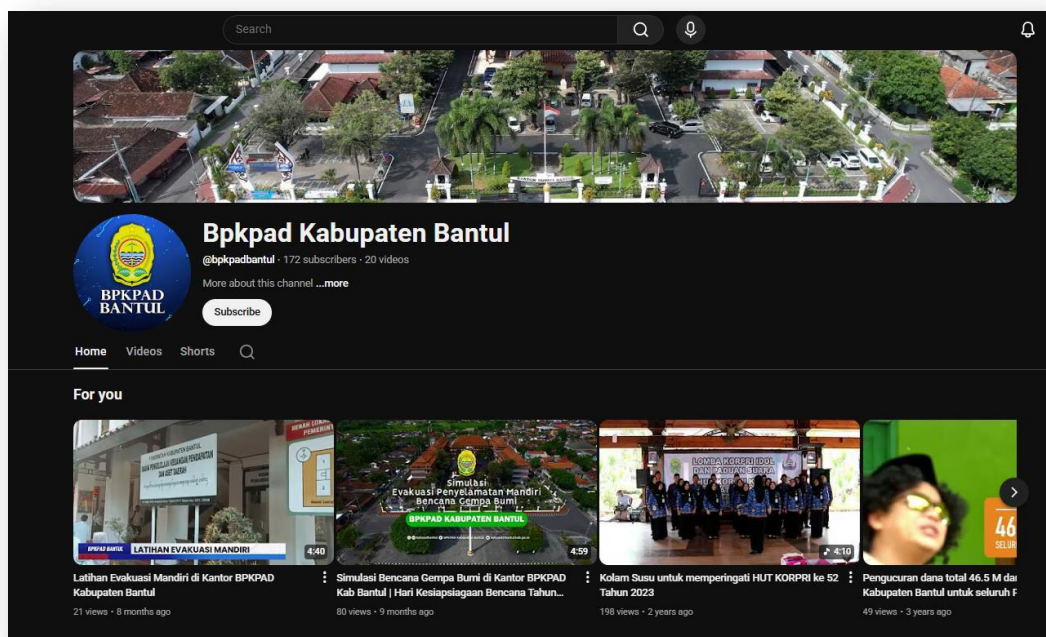
NIP. 19750325 199603 2 003

Lampiran II.

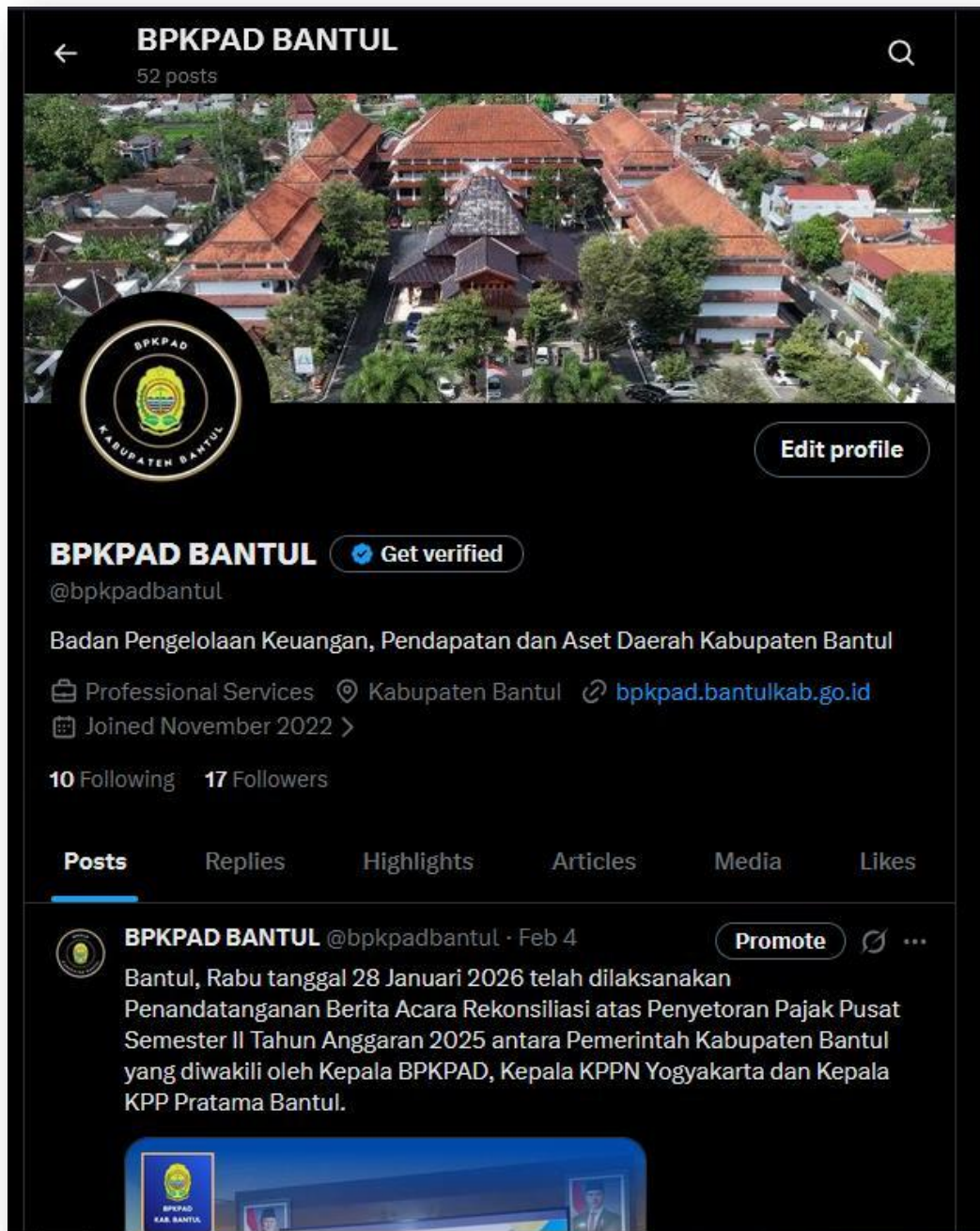
SARANA DAN PRASARANA KETERBUKAAN PUBLIK



Instagram : @bpkpadbantul



Youtube : bpkpadbantul



Twitter : bpkpadbantul



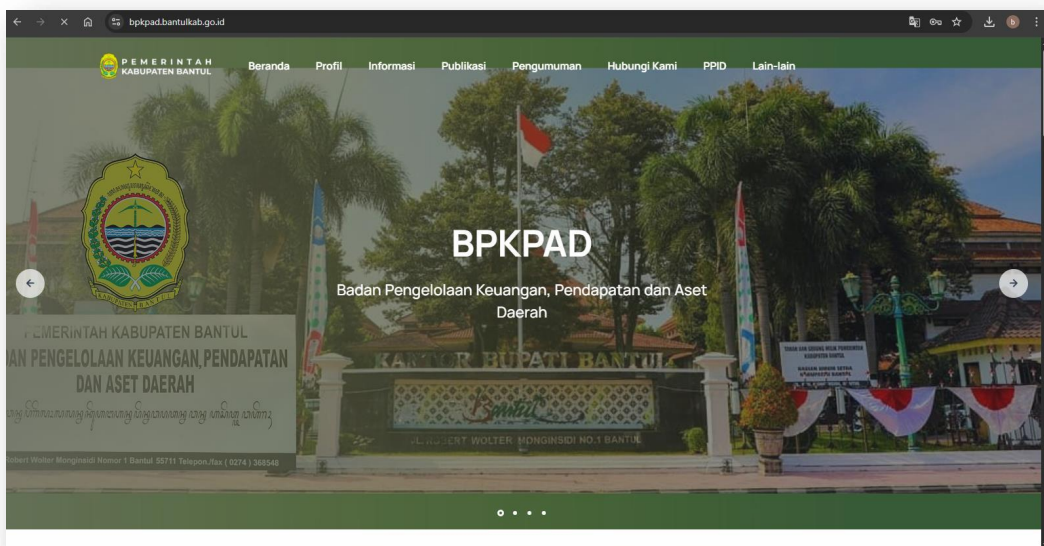
Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

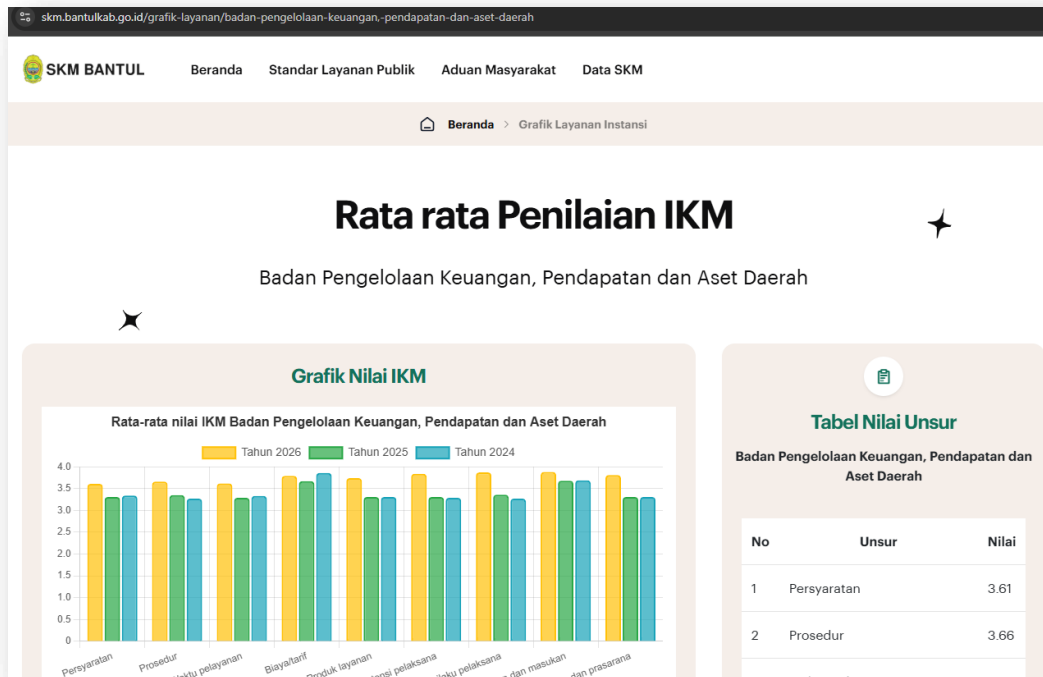
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Facebook : BPKPAD Kabupaten Bantul



Website : <https://bpkpad.bantulkab.go.id>



SKM BPKPAD Kabupaten Bantul : <https://skm.bantulkab.go.id/grafik-layanan/badan-pengelolaan-keuangan,-pendapatan-dan-aset-daerah>

**DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
2025**



Sosialisasi Self-Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 bagi PPID Pelaksana se-
Kabupaten Bantul



Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi Guna Dorong Optimalisasi
Layanan Informasi Publik





Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 dan
Penyerahan Piagam Penghargaan bagi Badan Publik yang Informatif



Workshop PPID dalam Optimalisasi Medsos untuk Layanan Publik